

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Kebon Sirih Raya No. 11 LM Jakarta Pusat

Nomor Telepon : 021-21230661

Penjelasan Umum : PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa menyampaikan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini untuk memenuhi kewajiban dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada BPR Bahana Ekonomi Sentosa yang mencakup Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome paling sedikit harus diwujudkan dalam sembilan faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.. Penerapan GCG dalam pelaksanaannya berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kinerja dan memaksimalkan nilai tambah bagi shareholder (maximizing shareholder value) dan menjamin terwujudnya sistem perbankan yang sehat secara umum. Etika dan perilaku merupakan pilar penting dalam membangun suatu budaya perusahaan yang bertanggung jawab, serta tingkah laku pribadi yang etis harus diterapkan dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis oleh segenap jajaran manajemen dan seluruh karyawan. Penerapan regulasi serta prinsip dasar GCG pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka untuk melindungi kepentingan semua pihak (stakeholders), serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG diantaranya dengan menyampaikan Laporan penerapan GCG...

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Indra Novandi	Direktur Utama	Menentukan kebijakan umum dalam memimpin Bank untuk mencapai tujuan Perusahaan. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang saham dalam RUPS. Direksi wajib menjalankan operasional perbankan dengan prinsip kehati-hatian untuk meningkatkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
2	Tiara Respati	Direktur	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang saham dalam RUPS. Direksi wajib menjalankan operasional perbankan dengan prinsip kehati-hatian untuk meningkatkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
3	Liliany	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang saham dalam RUPS. Direksi wajib menjalankan operasional perbankan dengan prinsip kehati-hatian untuk meningkatkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Memastikan pencapaian Rencana Bisnis BPR. 2. Fokus dalam menangani kredit bermasalah. 3. Meningkatkan kualitas SDM dalam hal pengetahuan dan keterampilan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

cukup jelas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Jony Mulyawan	Komisaris Utama	Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Dewan Komisaris memastikan Bank menjalankan prinsip kehati hatian untuk meningkatkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS
2	Yepi Hendarman	Komisaris	Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Dewan Komisaris memastikan Bank menjalankan prinsip kehati hatian untuk meningkatkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS

Rekomendasi Kepada Direksi

Direksi agar menjalankan Bank dengan prinsip kehati hatian dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Direksi agar menindaklanjuti temuan audit baik internal maupun eksternal

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

cukup Jelas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Modal inti dibawah Rp 50 Milyar belum diwajibkan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki saham di BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada kepemilikan saham Direksi di Perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Indra Novandi	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Tiara Respati	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Liliany	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan Direksi dengan BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Indra Novandi	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Tiara Respati	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Liliany	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga anggota Direksi satu dengan yang lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Jony Mulyawan	448.000.000	1,78

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Cukup Jelas

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Jony Mulyawan	PT BPR Panjawan Mitra Usaha	10,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Cukup Jelas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Jony Mulyawan	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Yepi Hendarman	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Jony Mulyawan	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Yepi Hendarman	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Pengurus lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	1167960000	2	881400000
2	Tunjangan	3	84000000	2	0
3	Tantiem	3	200326667	2	134400000
4	Kompensasi berbasis saham	3	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	3	0	2	0
	Total		1452286667		1015800000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Cukup Jelas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Transportasi (3)	Transportasi (2)
3	Asuransi Kesehatan	tidak ada	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Cukup Jelas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,13	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,97	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,94	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,02	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,99	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Cukup Jelas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	29-03-2023	5	1. Evaluasi terhadap kinerja Direksi. 2. Rencana Bisnis BPR. 3. Isu-su strategis. 4. Evaluasi/penetapan Kebijakan Strategis. 5. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR
2	14-06-2023	5	1. Evaluasi terhadap kinerja Direksi. 2. Rencana Bisnis BPR. 3. Isu-su strategis. 4. Evaluasi/penetapan Kebijakan Strategis. 5. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR
3	10-10-2023	5	1. Evaluasi terhadap kinerja Direksi. 2. Rencana Bisnis BPR. 3. Isu-su strategis. 4. Evaluasi/penetapan Kebijakan Strategis. 5. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR
4	10-12-2023	5	1. Evaluasi terhadap kinerja Direksi. 2. Rencana Bisnis BPR. 3. Isu-su strategis. 4. Evaluasi/penetapan Kebijakan Strategis. 5. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Cukup Jelas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Jony Mulyawan	4	0	100,00
2	Yepi Hendarman	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Cukup Jelas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada tindakan fraud yang dilakukan di BPR selama tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	2	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Cukup Jelas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230323	Kegiatan Sosial	Bantuan Kegiatan Isra Miraj	Musholla Ar Rahman	250.000
2	20230816	Kegiatan Sosial	Kegiatan HUT RI Ke 78 Untuk RW 07 Kebon Sirih	RW 07	1.000.000
3	20231006	Kegiatan Sosial	Kegiatan Isra Miraj RW 07 Kebon Sirih	RW 07	300.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Cukup Jelas

Nama BPR	: PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jl. Kebon Sirih Raya No. 11 LM Jakarta Pusat
Nomor Telepon	: 021-21230661
Modal Inti BPR	: 20.733.062.985,00
Total Aset BPR	: 368.051.044.945,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Secara struktur dan infrastruktur tatakelola BPR BES memenuhi ke-11 faktor dan ke-11 faktor ini sarana dan prasarannya ada di BPR BES.. Dengan terpenuhinya seluruh struktur dan infrastruktur tatakelola dalam proses pelaksanaan ke-11 faktor tersebut, proses pelaksanaannya dapat dikatakan memadai.. Hasil pelaksanaan tatakelola ini masih dapat ditingkatkan kepada tingkat yang lebih maksimal melalui pembaruan-pembaruan atau langkah-langkah yang terintegrasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi..

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,00	0,80	0,18	1,98	0.396	Secara struktur pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi terpenuhi dilihat dari struktur organisasi dan pelaksanaan tugas seluruh yang berada distruktur organisasi BPR BES dengan jumlah Direksi 3 (tiga) orang.. Secara umum proses penerapan tatakelola sudah memenuhi seluruh persyaratan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Direksi.. Hasil perjalanan operasional BPR BES dipertanggungjawabkan secara tahunan dalam RUPS tahunan dan penyampaian laporan-laporan disampaikan tepat waktu..
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,89	0,80	0,20	1,89	0.284	Secara struktur dan infrastruktur tatakelola untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terpenuhi. Proses tatakelola pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris seluruhnya terpenuhi. Dewan Komisaris menuangkan seluruh hasil rapat dam bentuk notulen rapat komisaris dan Dekom tidak melakukan intervensi atas berjalannya operasional BPR Bahana Ekonomi Sentosa.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Belum wajib memiliki komite karena modal inti masih dibawah Rp 50 milyar
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	Secara keseluruhan BPR BES sudah memiliki pedoman tatakelola dalam penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan, serta belum pernah terjadi benturan kepentingan.. Selama Tahun 2023 tidak ada benturan kepentingan. Tidak ada benturan kepentingan yang merugikan BPR BES dan pemilik atau pihak terkait atau pihak lain tidak mengintervensi Direksi ..

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,80	0,88	0,20	1,88	0.188	BPR Bahana Ekonomi Sentosa telah memiliki Direktur yang membawahkan Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan. Terpenuhinya struktur dalam penerapan fungsi kepatuhan, Pejabat Eksekutif perlu lebih untuk melakukan sosialisasi dan maksimalisasi memenuhi peraturan baru yang dikeluarkan oleh otoritas, disamping peraturan dan kebijakan atau pedoman yang sudah ada... Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sudah melakukan berbagai langkah untuk memastikan bahwa BPR sudah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lain, dan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah memastikan bahwa BPR sudah memiliki kebijakan atau SOP pada seluruh aktivitas organisasi dan telah sesuai dengan kebijakan/SOP yang dimilikinya serta melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan/SOP yang dimiliki sesuai sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,90	0,80	0,20	1,90	0.190	Secara struktur BPR Bahana Ekonomi Sentosa memiliki Pejabat Eksekutif Internal Audit dengan buku pedoman audit terkini yaitu audit berbasis risiko dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai dan kompeten dibidangnya.. Perlu ditingkatkan kembali dalam menindaklanjuti temuan baik itu internal maupun eksternal. Pelaksanaan audit berbasis risiko dengan melihat risiko yang potensial mengganggu kelangsungan usaha BPR menjadi prioritas dan sudah dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman audit BPR BES terkini.. Kualitas laporan dan peningkatan ketrampilan yang berkelanjutan perlu dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan audit..
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Struktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern sudah dilakukan sesuai aturan OJK tentang penunjukan AP dan KAP.. AP dan KAP yang ditunjuk terdaftar di OJK dan cakupan pemeriksaan serta Lingkup audit sudah sesuai sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku.. Hasil audit dan management letter diterima oleh BPR BES tepat waktu dan menggambarkan kinerja keuangan BPR BES serta dilaporkan ke OJK tepat waktu..

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	0,86	0,20	1,90	0.190	Struktur dan infrastruktur tatakelola Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern sudah ada pejabat eksekutif yang membidangi yaitu satu kesatuan dengan Sat.Ker.Kepatuhan dan BPR BES serta memiliki buku pedoman manajemen risiko yang mencakup kebijakan manajemen risiko (prosedur,penetapan limit dan pengelolaa risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru) sesuai dengan best practice dan ketentuan yang berlaku.. Struktur dan infrastruktur tatakelola Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern terpenuhi,namun kualitas manajemen risiko masih harus ditingkatkan..
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Struktur dan infrastruktur tatakelola Batas Maksimum Pemberian Kredit telah dibuatkan dalam bentuk kebijakan,sistem dan proedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK kepada pihak terkait,debitur grup dan/atau debitur besar termasuk pemantauannya dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.. Perlu ditingkatkan monitoring BMPK dalam setiap pemberian kredit maupun penempatan dana.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	0,80	0,20	1,84	0.138	Rencana bisnis BPR Bahana Ekonomi Sentosa sudah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi BPR BES. Dalam Rencana bisnis BPR BES sudah tergambar rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan serta rencana penyelesaian permasalahan BPR BES yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK. Dalam rencana bisnis BPR BES pemegang saham sepenuhnya mendukung dalam memperkuat struktur permodalan dan infrastruktur yang memadai seperti SD, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.. Bank perlu meningkatkan kembali monitoring terhadap setiap rencana Bisnis yang telah disusun.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,10	1,90	0.143	Teknologi system informasi mendukung operasional BPR BES untuk menyajikan pelaporan keuangan dan non keuangan dengan tepat waktu dan BPR BES telah memiliki kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.. BPR BES telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh OJK (Laporan keuangan publikasi triwulanan, semesteran dan tahunan) dengan menerapkan pengungkapan wajib yang dipersyaratkan oleh OJK dan pengungkapan sukarela yang menjadi nilai positif BPR BES, termasuk pelaksanaan transparansi informasi produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan OJK. Human error dalam proses Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan perlu dikelola dengan baik..

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Jumlah Direksi 3 (Tiga) orang.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Direktur Utama berdomisili di Jakarta Pusat dan Direktur Bisnis berdomisili di Bekasi serta Direktur Operasional & Kepatuhan domisili di Tangerang Selatan.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	tidak ada rangkap jabatan
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	tidak memiliki hubungan keluarga
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Tidak ada proyek khusus dan tidak ada perikatan dengan pihak perorangan. Yang ada pengikatan dengan pihak profesional seperti Notaris dan Kantor Jasa Penilai serta Kantor Akuntan Publik.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	sudah sesuai
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa mengalihkan tugas dan wewenang tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit yang dimaksud.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi setiap saat mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dari Sistem Teknologi Informasi yang dipergunakan..
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Perbedaan pendapat diperkenankan dalam rapat Direksi, jika tidak dipenuhi musyawarah dan mufakat melalui sarana Dissetting Opinion.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi hanya mendapatkan remunerasi dan fasilitas lainnya berdasarkan keputusan RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi mempersiapkan seluruh karyawan untuk diikutsertakan pada program pendidikan dan pelatihan pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi..
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi telah mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki pedoman tata tertib kerja
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai tentang kebijakan strategis BPR melalui media elektronik dan non elektronik.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi ditungkan dalam notulen rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan disseting opinion yang terjadi dalam rapat Direksi guna ditindak lanjuti.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Secara umum terjadi peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi, hal ini dapat dilihat dari peningkatan kinerja keuangan, penyelesaian permasalahan dan pencapaiannya mendekati ekspektasi stakeholders..
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Seluruh laporan-laporan kepada para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku disampaikan tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	sudah sesuai
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	sudah sesuai
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	seluruh Dekom telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Skala penerapan 2
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja seperti aturan etika kerja, waktu kerja dan pelaksanaan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	tidak ada rangkap jabatan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	tidak memiliki hubungan keluarga

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dekom lain
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	1,78	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,89	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dekom telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dekom telah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kebijakan strategis BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dekom tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris sudah memastikan seluruh temuan (audit intern, audit ekstern, OJK dan otoritas lain) telah ditindak lanjuti oleh Direksi melalui mekanisme surat penyampaian tindak lanjut ke OJK dan internal BPR BES..
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab seluruh Direksi dan melalui rapat direksi dan komisaris dilakukan evaluasi atas kinerja BPR BES dan mengarahkan serta memantau apa yang diambil dalam keputusan rapat DIRKOM serta memberikan nasehat dan rekomendasi dengan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. Frekuensi rapat Dirkom sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat, bila tidak tercapai dilakukan dengan mekanisme dissenting opinion.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Seluruh Dewan Komisaris mendapatkan remunerasi dan fasilitas lainnya melalui mekanisme RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dekom telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dibuat dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinion dicatatkan dalam notulen rapat..
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian tentang benturan kepentingan yang tertuang didalam kebijakan tatakelola BPR Bahana Ekonomi Sentosa.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Tidak ada benturan kepentingan yang dieksekusi.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Tidak ada benturan kepentingan yang merugikan BPR Bahana Ekonomi Sentosa.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak merangkap jabatan dan tidak membawahi bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Perbankan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	PE Kepatuhan ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE Kepatuhan telah menyusun dan melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur Kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sudah melakukan berbagai langkah untuk memastikan bahwa BPR sudah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lain. Secara internal dilakukan sosialisasi dan pelatihan untuk ketentuan terkini, memantau dan menjaga kepatuhan BPR BES terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR BES kepada OJK termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR BES yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku..
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan belum secara berkala melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,88	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dilakukan dengan pelatihan yang berkelanjutan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif sudah melaksanakannya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku akan tetapi perlu ditingkatkan kualitas temuan tersebut.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pokok-pokok hasil audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Sudah sesuai dengan ketentuan OJK tentang penunjukkan AP dan KAP.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	KAP & AP yang ditunjuk terdaftar di OJK dan sudah mendapat persetujuan dari RUPS.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Hasil audit KAP dan management letter sudah disampaikan tepat waktu kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan management letter sudah menggambarkan permasalahan BPR dan diterima tepat waktu oleh BPR BES dari KAP yang ditunjuk.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan audit sudah sesuai dengan Lingkup audit sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku..

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR BES sudah memiliki PE Manajemen Risiko yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disatukan pada PE Kepatuhan, M.Risiko & APU-PPT..
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi sudah membuat, menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. Direksi melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan melakukan evaluasi atas penerapan manajemen risiko yang dijalankan oleh Direksi..
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Pelaksanaan manajemen risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko atas seluruh faktor risiko yang bersifat material sudah diterapkann dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh sudah dijalankan dan melekat pada setiap kebijakan, prosedur dan pedoman-pedoman yang diterbitkan oleh BPR BES. BPR BES menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK dengan membuat sistem informasi manajemen yang memadai yang mampu menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen risiko..
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi sudah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh tingkatan jenjang organisasi dengan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi tentang manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	2,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,86	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain dan dilaporkan ke OJK tepat waktu serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik..
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK kepada pihak terkait, debitur grup dan/atau debitur besar termasuk pemantauannya dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR sudah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK dengan menyesuainya atas peraturan perundang-undangan terkini..
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah menetapkan pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar yang telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan..
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah membuat laporan mengenai laporan pemberian kredit agar tidak melanggar BMPK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak melanggar BMPK.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR BES sudah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi BPR BES..
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dalam Rencana bisnis BPR BES sudah tergambar rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan serta rencana penyelesaian permasalahan BPR BES yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Dalam rencana bisnis BPR BES pemegang saham sepenuhnya mendukung dalam memperkuat struktur permodalan dan infrastruktur yang memadai seperti SDM,teknologi informasi,jaringan kantor,kebijakan dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Dalam rencana bisnis BPR BES yang disusun secara realistis,komprehensif dan terukur serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR BES dengan menerapkan azas perbankan yang sehat dengan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko..
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan rencana bisnis BPR BES dilakukan antara lain melalui Rapat DIRKOM..
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR BES dan perubahan rencana bisnis (Jika ada) disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku..
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR BES memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung dengan teknologi sistem informasi yang memadai saat ini dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh..
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR BES telah menyusun dan melaporkan ke OJK Laporan keuangan publikasi per triwulan dengan materi memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan OJK. Untuk laporan tahunan telah memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR BES, seluruh aspek transparansi dan informasi serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR BES menjalankan terhadap pernyataan no.6 dengan berpedoman pada persyaratan dan tatacara yang sesuai ketentuan OJK.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Bahana Ekonomi Sentosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Jakarta, 25 Januari 2024

PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA

Menyetujui



Indra Novandi
Direktur Utama



Liliany
Direktur Operasional Membawahkan kepatuhan



Tiara Respati
Direktur
Mengetahui



Jony Mulyawan
Komisaris Utama



Yepi Hendarman
Komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut :

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	23 Maret 2023	Sosial	Bantuan Kegiatan Isra Miraj	Musholla Ar Rahman	Rp250.000
2.	16 Agustus 2023	Sosial	Kegiatan HUT RI Ke 78 Untuk RW 07 Kebon Sirih	RW 07	Rp1.000.000
3.	06 Oktober 2023	Sosial	Kegiatan Isra Miraj RW 07 Kebon Sirih	RW 07	Rp300.000

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
Cukup Jelas

Jakarta, 25 Januari 2024

PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA

Menyetujui


Indra Novandi
Direktur Utama






Liliany

Direktur Operasional Membawahkan kepatuhan


Tiara Respati
Direktur

Mengetahui


Jony Mulyawan
Komisaris Utama


Yepi Hendarman
Komisaris

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA
Alamat	: Jl. Kebon Sirih Raya No. 11 LM Jakarta Pusat
Nomor Telepon	: 021-21230661
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp20.733.062.985
Total Aset	: Rp368.051.044.945

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.98	0.396
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.89	0.284
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.88	0.188
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.9	0.19
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.9	0.19
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2	0.15
10	Rencana Bisnis BPR	1.84	0.138
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.9	0.143
Nilai Komposit			1.8
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.98)

Secara struktur pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi terpenuhi dilihat dari struktur organisasi dan pelaksanaan tugas seluruh yang berada distruktur organisasi BPR BES dengan jumlah Direksi 3 (tiga) orang.

Secara umum proses penerapan tatakelola sudah memenuhi seluruh persyaratan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Direksi.

Hasil perjalanan operasional BPR BES dipertanggungjawabkan secara tahunan dalam RUPS tahunan dan penyampaian laporan-laporan disampaikan tepat waktu.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.89)

Secara struktur dan infrastruktur tatakelola untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terpenuhi

Proses tatakelola pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris seluruhnya terpenuhi

Dewan Komisaris menuangkan seluruh hasil rapat dan bentuk notulen rapat komisaris dan Dekom tidak melakukan intervensi atas berjalannya operasional BPR Bahana Ekonomi Sentosa

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Belum wajib memiliki komite karena modal inti masih dibawah Rp 50 milyar

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

Secara keseluruhan BPR BES sudah memiliki pedoman tatakelola dalam penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan, serta belum pernah terjadi benturan kepentingan.

Selama Tahun 2023 tidak ada benturan kepentingan

Tidak ada benturan kepentingan yang merugikan BPR BES dan pemilik atau pihak terkait atau pihak lain tidak mengintervensi Direksi .

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.88)

BPR Bahana Ekonomi Sentosa telah memiliki Direktur yang membawahkan Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan

Terpenuhinya struktur dalam penerapan fungsi kepatuhan,Pejabat Eksekutif perlu lebih untuk melakukan sosialisasi dan maksimalisasi memenuhi peraturan baru yang dikeluarkan oleh otoritas,disamping peraturan dan kebijakan atau pedoman yang sudah ada..

Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sudah melakukan berbagai langkah untuk memastikan bahwa BPR sudah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lain, dan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah memastikan bahwa BPR sudah memiliki kebijakan atau SOP pada seluruh aktivitas organisasi dan telah sesuai dengan kebijakan/ SOP yang dimilikinya serta melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan/ SOP yang dimiliki sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.9)

Secara struktur BPR Bahana Ekonomi Sentosa memiliki Pejabat Eksekutif Internal Audit dengan buku pedoman audit terkini yaitu audit berbasis risiko dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai dan kompeten dibidangnya.

Perlu ditingkatkan kembali dalam menindaklanjuti temuan baik itu internal maupun eksternal

Pelaksanaan audit berbasis risiko dengan melihat risiko yang potensial mengganggu kelangsungan usaha BPR menjadi prioritas dan sudah dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman audit BPR BES terkini.

Kualitas laporan dan peningkatan ketrampilan yang berkelanjutan perlu dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan audit.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

Struktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern sudah dilakukan sesuai aturan OJK tentang penunjukkan AP dan KAP.

AP dan KAP yang ditunjuk terdaftar di OJK dan cakupan pemeriksaan serta Lingkup audit sudah sesuai sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku.

Hasil audit dan management letter diterima oleh BPR BES tepat waktu dan menggambarkan kinerja keuangan BPR BES serta dilaporkan ke OJK tepat waktu.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.9)

Struktur dan infrastruktur tatakelola Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern sudah ada pejabat eksekutif yang membidangi yaitu satu kesatuan dengan Sat.Ker.Kepatuhan dan BPR BES serta memiliki buku pedoman manajemen risiko yang mencakup kebijakan manajemen risiko (prosedur, penetapan limit dan pengelola risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru) sesuai dengan best practice dan ketentuan yang berlaku.

Struktur dan infrastruktur tatakelola Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern terpenuhi, namun kualitas manajemen risiko masih harus ditingkatkan.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

Struktur dan infrastruktur tatakelola Batas Maksimum Pemberian Kredit telah dibuatkan dalam bentuk kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK kepada pihak terkait, debitur grup dan/ atau debitur besar termasuk pemantauannya dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

Perlu ditingkatkan monitoring BMPK dalam setiap pemberian kredit maupun penempatan dana

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.84)

Rencana bisnis BPR Bahana Ekonomi Sentosa sudah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi BPR BES; Dalam Rencana bisnis BPR BES sudah tergambar rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan serta rencana penyelesaian permasalahan BPR BES yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK. Dalam rencana bisnis BPR BES pemegang saham sepenuhnya mendukung dalam memperkuat struktur permodalan dan infrastruktur yang memadai seperti SD, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.

Bank perlu meningkatkan kembali monitoring terhadap setiap rencana Bisnis yang telah disusun

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.9)

Teknologi system informasi mendukung operasional BPR BES untuk menyajikan pelaporan keuangan dan non keuangan dengan tepat waktu dan BPR BES telah memiliki kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

BPR BES telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh OJK (Laporan keuangan publikasi triwulanan, semesteran dan tahunan) dengan menerapkan pengungkapan wajib yang

dipersyaratkan oleh OJK dan pengungkapan sukarela yang menjadi nilai positif BPR BES, termasuk pelaksanaan transparansi informasi produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan OJK
Human error dalam proses Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan perlu dikelola dengan baik.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Secara struktur dan infrastruktur tatakelola BPR BES memenuhi ke-11 faktor dan ke-11 faktor ini sarana dan prasarananya ada di BPR BES.

Dengan terpenuhinya seluruh struktur dan infrastruktur tatakelola dalam proses pelaksanaan ke-11 faktor tersebut, proses pelaksanaannya dapat dikatakan memadai.

Hasil pelaksanaan tatakelola ini masih dapat ditingkatkan kepada tingkat yang lebih maksimal melalui pembaruan-pembaruan atau langkah-langkah yang terintegrasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Jakarta, 25 Januari 2024

PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA

Menyetujui



Indra Novandi
Direktur Utama



Liliany

Direktur Operasional Membawahkan kepatuhan



Tiara Respati
Direktur

Mengetahui



Jony Mulyawan
Komisaris Utama



Yepi Hendarman
Komisaris